

MENUJU INDONESIA YANG BERMAKNA: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia.

Reza A.A Wattimena,

Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya

Abstract:

Inspired by Charles Taylor's Political Philosophy, the author will argue that to become a meaningful society, Indonesian society first of all has to respect various forms of life in the society. The various forms of life have to live authentically according to its identity, value, and customs in relation with other forms of life that co-exist in the society. The author will also try to apply Taylor's political philosophy in the context of Indonesian society. In the end, Indonesian context can give certain critical remarks to the development of Taylor's philosophy.

Keywords: Identitas, multikulturalisme, politik pengakuan.

"Jika hanya ada satu agama di Inggris maka akan ada bahaya despotisme, jika ada dua, mereka akan saling membunuh, namun jika ada tiga, maka mereka akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan."

Voltaire

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah cerita. Sandra adalah orang Jawa yang tinggal Prancis. Ia adalah seorang gadis yang sangat berbakti pada orang tuanya. Orang tuanya tinggal di Surabaya. Mereka berasal dari suatu kota di Jawa Tengah. Mereka merasa bahwa Sandra perlu untuk mengenal dunia luar. Maka kedua orang tuanya menyekolahkan Sandra untuk menempuh pendidikan lanjut di Paris, Prancis. Ia menjadi gadis yang cerdas, kritis, dan sangat mencintai orang tuanya. Di Paris ia berhasil menyelesaikan studinya dengan gemilang, dan bahkan menjalin hubungan serius dengan teman sekolahnya. Mereka siap untuk menikah dan membina hidup bersama.

Namun orang tua Sandra memiliki rencana berbeda. Mereka sudah mempersiapkan orang yang, menurut mereka, tepat untuknya, yakni

seorang pria yang memiliki latar belakang persis sama dengan Sandra. Secara kultural pria tersebut adalah pasangan yang tepat untuk Sandra. Namun ia menolak dengan alasan sudah memiliki pasangan jiwa. Tegangan pun terjadi. Atas nama budaya dan tradisi, orang tua Sandra menyarankan pria tersebut sebagai pasangan hidupnya. Atas nama kebebasan dan cinta, yang juga merupakan bagian dari tradisi masyarakat tertentu, Sandra memilih pasangan jiwanya di Paris sana. Ia bingung. Orang tuanya pun bingung.¹ Apa yang harus mereka lakukan?

Sekilas kisah ini mirip cerita sinetron. Namun di balik cerita ini terdapat problem masyarakat multikultur yang sangat mendalam, yakni apa yang harus dilakukan, ketika dua kultur bertemu dan saling berbeda pandangan? Jawaban yang biasanya langsung muncul adalah melakukan dialog. Namun dialog tanpa dasar nilai dan pemikiran yang sama tidak akan banyak membuahkan hasil. Dialog hanya menjadi gosip ataupun *ngerumpi* semata yang seringkali berakhir dalam kebuntuan. Maka yang diperlukan adalah menemukan dasar nilai yang sama untuk menjadi titik tolak dari dialog. Sebelum itu inti terdalam dari tegangan kultural yang terjadi juga perlu untuk dipahami. Pada titik inilah wacana multikulturalisme menemukan relevansinya.

Banyak kasus lainnya dengan intensitas jauh lebih besar berlatar pada tegangan kultur tersebut. Di dalam filsafat politik kontemporer, pertanyaan inti yang diajukan sebagai titik awal penelitian adalah, bagaimanakah bentuk politik kultural yang mampu menampung semua identitas kultural secara harmonis (hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan) dan dinamis (terbuka pada perubahan, baik dari dalam maupun dari luar)? Itulah kiranya pertanyaan yang juga menjadi pergulatan wacana multikulturalisme. Pada tulisan ini saya hendak menjawab pertanyaan tersebut dengan mengacu pada filsafat politik Charles Taylor sebagaimana dituliskannya di dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*.² Pada akhir tulisan, saya berharap juga mampu memberikan alternatif untuk permasalahan Sandra dan orang tuanya.

Untuk itu saya akan membagi tulisan ini ke dalam empat bagian. Awalnya saya akan memperkenalkan sosok hidup maupun pemikiran Charles Taylor (1). Lalu saya akan menjelaskan pandangannya soal politik

1 Cerita ini saya adaptasi dengan konteks Indonesia, namun mengacu pada, Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, London: MacMillan Press, 2000.

2 Pada tulisan ini saya ingin membahas pandangan Charles Taylor tentang politik pengakuan dan multikulturalisme, serta menanggapi secara kritis. Saya mengacu pada Charles Taylor, "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutmann, ed., *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

pengakuan dan multikulturalisme (2). Pada bagian berikutnya saya akan mencoba menerapkan pandangan Taylor tersebut di dalam konteks masyarakat Indonesia.³ Bagian ini bukanlah sebuah analisis komprehensif tentang Indonesia melalui kaca mata filsafat politik Charles Taylor, melainkan sebuah eksperimen berpikir awal tentang kemungkinan penerapan multikulturalisme dan politik pengakuan di dalam masyarakat Indonesia dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor demografis, kultural, filosofis, dan geografis Indonesia (3). Tulisan ini akan saya tutup dengan kesimpulan dan tanggapan kritis, sekaligus mengajukan beberapa prinsip dasar yang sekiranya bisa menjadi panduan bagi Sandra dan orang tuanya untuk membuat keputusan (4).

1. Sosok Hidup dan Pemikiran Charles Taylor

Charles Taylor lahir pada 5 November 1931.⁴ Ia berasal dari Kanada, yakni kota Montreal, Quebec. Ia adalah seorang filsuf yang memiliki jangkauan penelitian dan refleksi sangat luas, mulai dari filsafat politik, filsafat ilmu-ilmu sosial, dan sejarah filsafat. Pada 1952 Taylor meraih gelar B.A pada bidang sejarah dari Universitas McGill. Kemudian ia melanjutkan studi ke Oxford pada bidang filsafat, politik, dan ekonomi. Pada 1955 ia menjalani studi doktoral di bawah Isaiah Berlin dan G.E.M. Anscombe pada bidang filsafat.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Taylor bekerja di Universitas Oxford sebagai professor pada bidang teori sosial dan teori politik. Selain itu dia juga adalah seorang profesor pada bidang filsafat dan ilmu politik di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Sekarang ini ia telah pensiun, dan menjadi profesor emeritus. Pada 1955 ia memperoleh gelar kehormatan *Order of Canada*, penghargaan tinggi pemerintah Kanada terhadap warganya. Pada Juni 2008 Taylor memperoleh Kyoto Prize pada bidang filsafat dan seni. Banyak ahli berpendapat bahwa Kyoto Prize adalah hadiah nobel versi Jepang.

Menurut Ruth Abbey ada beberapa hal yang membuat Charles Taylor dapat dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar abad ke-20.⁵

3 Bandingkan dengan pemaparan yang sangat menarik di dalam Robert W. Hefner, ed., *The Politics of Multiculturalism*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001. Saya sadar sekali Taylor berangkat dari tradisi intelektual yang sangat berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu saya tidak akan menerapkan pemikirannya begitu saja, namun dengan catatan kritis. Secara sederhana dapat dikatakan, pemikiran Charles Taylor dapat memberikan kontribusi penting bagi Indonesia, dan situasi serta kultur Indonesia bisa memperkaya pemikiran Charles Taylor secara khusus, maupun wacana politik pengakuan dan multikulturalisme pada umumnya.

4 Untuk pengenalan sosok dan pemikiran Charles Taylor, saya mengacu pada: [http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_\(philosopher\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(philosopher)) diakses pada 12 Oktober pk. 11.15.

5 Untuk selanjutnya saya mengacu pada tulisan Ruth Abbey, "Timely Meditations in an

Selama lebih dari empat puluh tahun, Taylor menulis banyak sekali artikel dan buku, serta berdiskusi di forum-forum publik tentang masalah-masalah yang sedang relevan. Usia tua tidak membuatnya kedodoran. Sebaliknya pada usia tua, ia justru menulis karya-karya baru yang mencerahkan banyak orang di berbagai bidang. Tulisan-tulisannya dibaca orang hampir di seluruh dunia. Dia berbicara dan menulis dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Perancis dengan sangat mahir. Menurut Abbey yang membuat Taylor layak disebut sebagai salah satu filsuf terbesar abad ke-20 adalah jangkauan tema analisisnya yang begitu luas dan mendalam. Ia banyak menulis tentang moral, subyektivitas, teori politik, epistemologi, hermeneutika, filsafat pikiran, filsafat bahasa, dan bahkan estetika. Belakangan ini ia banyak juga menulis tentang agama.

Pada era sekarang banyak ilmuwan begitu terspesialisasi di bidangnya, sehingga lupa dengan hal-hal lain di luar disiplin keilmuannya. Namun hal ini rupanya tidak terjadi pada Taylor. Ia mampu menulis tentang berbagai macam hal, namun dengan analisis maupun refleksi yang sangat mendalam. Oleh karena itu ia juga banyak disamakan dengan para filsuf klasik yang memang menulis tentang banyak hal, sekaligus secara mendalam. Abbey bahkan menempatkan Taylor setara dengan Plato, Aristoteles, Augustinus, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, John Stuart Mill, dan Nietzsche dalam hal keluasan sekaligus kedalaman pemikiran.

Walaupun menulis tentang beragam tema, namun jika kita membaca tulisan Taylor, kita langsung merasa terlibat di dalam perdebatan tentang tema-tema yang sedang relevan di masyarakat. Dengan kata lain filsafat Taylor sekaligus membentuk sistem yang kelihatan klasik, namun sekaligus relevan dengan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi masyarakat modern sekarang ini. Dalam bahasa Abbey filsafat Taylor sekaligus tepat pada waktunya (*timely*) dan abadi (*untimely*).⁶ Dengan bekal itu filsafat Taylor sekaligus sistematis dan fleksibel. Posisinya teoritis filosofisnya jelas, namun sekaligus terbuka untuk bisa memahami persoalan-persoalan baru yang sedang muncul. Hal yang sama kiranya berlaku

Untimely Mode," dalam Ruth Abbey, ed., *Charles Taylor*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 1. "Several things mark Charles Taylor as a distinctive figure in the landscape of contemporary philosophy. Taylor has been publishing consistently and prolifically for over four decades and despite his retirement from McGill University some years ago, his intellectual energies continue unabated...."

- 6 Lihat, *ibid*, 2. "This blend of timely thinking and untimely mode raises the question of system in Taylor's thought. On the one hand, a thinker with something to say on a diverse range of philosophical questions might be expected to display a rigid, and possibly even predictable, consistency in response to different issues. On the other hand, one who so directly engages the debates of the day might understandably be more sporadic and targeted in his or her contributions."

untuk filsafat politiknya, terutama tentang politik pengakuan dan multikulturalisme yang akan coba saya analisis secara detil pada bagian berikutnya.

2. Politik Pengakuan dan Multikulturalisme

2.1 Multikulturalisme

Menurut Taylor esensi atau inti terdapat dalam wacana multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*). Perjuangan inilah yang menjadi dorongan dasar dari begitu banyak gerakan politik yang muncul pada pertengahan sampai akhir abad ke-20, seperti feminisme, gerakan kaum gay, dan sebagainya. Tidak hanya itu gerakan tersebut juga muncul di dalam perjuangan kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas mereka dari penjajahan kelompok mayoritas, baik dalam hal agama maupun etnis.⁷

Di dalam politik pengakuan, orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda dari budaya minoritas ingin mempertahankan identitasnya yang unik. Mereka tidak hanya ingin supaya identitasnya ada, tetapi supaya identitas tersebut bisa berkembang secara dinamis dengan identitas-identitas lainnya di dalam masyarakat. Dalam arti ini identitas diri seseorang adalah sesuatu yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat pemahaman tentang siapa dan dari mana mereka. Dapat juga dikatakan bahwa identitas adalah hakikat fundamental dari manusia itu sendiri.

2.2 Gambaran Diri

Berkembang atau tidaknya identitas seseorang sangatlah tergantung dari pengakuan ataupun penolakan dari orang lain. Orang ataupun kelompok tertentu, menurut Taylor, bisa mengalami kehancuran, jika identitasnya tidak diakui atau bahkan ditolak oleh masyarakat sekitarnya. "Penolakan untuk mengakui..." demikian tulis Taylor, "dapat berbentuk operasi, penangkapan atau pemenjaraan palsu, dan... cara hidup yang telah direduksi..."⁸ Penolakan tersebut menghasilkan gambaran yang jelek tentang orang ataupun masyarakat yang ditolak. Gambaran itu tidak hanya ada di pikiran masyarakat yang menolaknya, tetapi juga di dalam pikiran orang-orang yang ditolak. Akibatnya gambaran diri (*self-image*) orang-orang ataupun masyarakat yang ditolak menjadi negatif. Di dalam

7 Lihat, Taylor, *op.cit.*, 25. "And the demand comes to the fore in a number of ways in today's politics, on behalf of minority or 'subaltern' groups, in some forms of feminism and in what is today called the politics of 'multiculturalism.'"

8 *Ibid.* "Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of being."

bahasa Taylor, mereka "...menginternalisasi gambaran yang inferior tentang diri mereka sendiri..."⁹

Taylor menjadikan gerakan feminisme sebagai contohnya. Para pemikir feminis berpendapat, bahwa perempuan di dalam masyarakat patriarki telah menginternalisasi pandangan yang jelek tentang diri mereka sendiri. Dengan kata lain para perempuan tersebut memandang diri mereka sendiri inferior. Akibatnya mereka tidak dapat berkembang, karena mereka tidak memiliki pikiran dan keinginan untuk berkembang. Mereka tidak mampu mengambil kesempatan untuk maju. Banyak dari perempuan tersebut hidup di dalam bayang-bayang penindasan gambaran diri perempuan yang memang sudah lama terbentuk di dalam masyarakat patriarki.

Distorsi gambaran diri ini tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan. Orang-orang yang berasal dari kelompok minoritas pun mengalaminya. Banyak dari mereka hidup dalam kepercayaan diri yang sangat rendah. Taylor memberikan contoh kehidupan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun orang-orang kulit putih Eropa dan Amerika menciptakan gambaran yang jelek tentang orang-orang berkulit hitam. Banyak dari orang-orang kulit hitam tidak mampu bersikap kritis terhadap gambaran tersebut, dan bahkan mengadopsinya sebagai bagian dari identitas diri mereka. Penindasan gambaran diri ini adalah penindasan yang paling halus, sekaligus paling terasa akibatnya. Orang menjadi tidak mau dan tidak mampu berkembang, karena ia tidak bisa melepaskan diri dari gambaran diri yang buruk tentang dirinya sendiri.

Maka menurut analisis Taylor, "tugas pertama adalah untuk memurnikan diri mereka sendiri dari identitas destruktif yang dipaksakan untuk diinternalisasi kepada mereka."¹⁰ Konsep yang sama kiranya bisa diterapkan pada negara-negara yang pernah mengalami penjajahan selama bertahun-tahun, seperti Indonesia misalnya. Sudah sejak abad ke-13, bangsa-bangsa Eropa, yang nantinya menjajah hampir seluruh dunia, memandang orang-orang di luar Eropa sebagai orang-orang yang tidak beradab dan lebih rendah. Melalui penjajahan gambaran tersebut dipaksakan kepada orang-orang di luar Eropa. Mereka pun menerimanya dan menjadikan gambaran diri yang jelek tersebut sebagai bagian dari identitas mereka. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, masyarakat Indonesia harus berani menantang dan melepaskan diri dari gambaran negatif sebagai bangsa bodoh dan pemalas, yang diciptakan dan dipaksakan oleh bangsa penjajah.

9 *Ibid.* "... Internalized a picture of their own inferiority...."

10 *Ibid.*, 26. "Their first task ought to be to purge themselves of this imposed and destructive identity."

Maka konsekuensi tidak adanya pengakuan ataupun penolakan pada identitas diri ataupun kelompok tertentu memiliki akibat yang sangat besar. Selain merasa dibenci oleh lingkungannya, mereka juga bisa membenci dirinya sendiri. Jika sudah membenci dirinya sendiri, orang cenderung tidak dapat berkembang, karena ia merasa tidak mampu mengubah keadaan jelek yang memang sudah menempa dirinya. "Dengan demikian," tulis Taylor, "pengakuan bukanlah kebaikan yang diberikan oleh orang lain secara sukarela. Pengakuan adalah kebutuhan manusia yang sangat penting."¹¹

2.3 Perkembangan Multikulturalisme

Bagi Taylor filsafat politik Hegel adalah dasar bagi seluruh wacana politik pengakuan dan multikulturalisme, terutama pandangan Hegel soal dialektika tuan dan budak (*dialectic of master and slave*). Di samping itu wacana tentang identitas dan pengakuan juga muncul, karena disebabkan oleh faktor-faktor historis politis tertentu. Taylor menuliskan satu hal yang kiranya sangat penting, yakni hancurnya tatanan hirarki sosial yang lama, yang bersifat feodalistik. Dahulu di Eropa maupun di Indonesia, orang yang lahir dari keluarga bangsawan memiliki kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Dasar dari kedudukan tersebut adalah darah bangsawan, atau yang banyak disebut orang Indonesia sebagai keturunan darah biru. Di dalam masyarakat semacam itu, ketidaksetaraan adalah fakta dunia yang diterima begitu saja. Orang yang berasal dari keluarga biasa memiliki status yang lebih rendah dari pada orang yang berasal dari keluarga bangsawan.

Tentu saja pandangan tersebut sudah menghilang. Di dalam masyarakat modern, kehormatan bukanlah sesuatu yang didapat melalui darah keturunan bangsawan, melainkan sesuatu melekat di dalam kemanusiaan setiap orang. "Sebagai lawan dari konsep kehormatan yang lama," demikian tulis Taylor, "kita memiliki konsep modern seperti harkat dan martabat manusia, yang digunakan dalam arti yang egaliter dan universal, di mana kita berbicara tentang martabat manusia yang bersifat inheren, atau martabat warga negara."¹² Karena bersifat inheren, egaliter, dan universal, maka setiap manusia, lepas dari suku, ras, ataupun agama, memilikinya.

Pandangan terakhir ini hanya bisa hidup dan berkembang di dalam masyarakat demokratis. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang

11 *Ibid.* "Due recognition is not just a courtesy we owe people. It is vital human need."

12 *Ibid.*, 27. "As against this notion of honor, we have the modern notion of dignity, now used in a universalist and egalitarian sense, where we talk of the inherent 'dignity of human beings,' or of citizen dignity."

bersifat inheren di dalam dirinya, lepas dari suku, ras, agama, ataupun kelas sosial-ekonomi. Inilah pandangan tentang manusia yang menempati peran sangat penting di dalam masyarakat demokratis. "Demokrasi," demikian Taylor, "telah mengantarkan kita memasuki politik pengakuan, yang telah mengambil bermacam-macam bentuk sekarang ini, dan sekarang kembali dalam bentuk tuntutan untuk status yang setara dalam bidang budaya dan gender."¹³ Dengan kata lain inti terdalam dari demokrasi dan politik pengakuan sebenarnya sama, yakni tuntutan untuk kesetaraan kultur dan gender.

2.4 Konsep Manusia

Namun menurut Taylor konsep pengakuan (*recognition*) telah mengalami perubahan dewasa ini, terutama dengan munculnya pemahaman baru mengenai ideal manusia modern, yakni manusia otentik. Manusia otentik adalah manusia yang memiliki identitas dan jati diri yang unik, dan ia hidup berdasarkan keunikannya itu. Konsep semacam ini berkembang, setelah pemikiran Kierkegaard, dengan filsafat eksistensialismenya, menjadi wacana yang cukup dominan pada pertengahan abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Manusia yang otentik adalah manusia yang setia dan jujur pada dirinya sendiri.

Pada abad ke-18, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki konsep moral yang bersifat intuitif. Artinya ia bisa tahu tentang baik dan buruk melalui perasaan yang memang sudah ada di dalam dirinya. Moralitas dapat ditemukan di dalam hati sanubari manusia, dan bukan hanya soal analisis rasional. Dalam hal ini mirip seperti yang pernah dinyatakan oleh Agustinus, jalan untuk sampai pada kebenaran ilahi adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri. Kunci untuk sampai pada kebenaran adalah dengan melihat ke dalam diri sendiri.

Konsep ini semakin nyata dengan berkembangnya filsafat Jean-Jacques Rousseau. Bagi dia moralitas bukanlah soal sosial, melainkan sesuatu yang tertanam di dalam diri setiap orang. Soal baik dan buruk adalah soal yang terkait dengan diri pribadi yang memiliki hati nurani. Pandangan Rousseau ini kemudian dikembangkan oleh Herder, seorang filsuf Jerman. Baginya tolok ukur moral terdalam seseorang pada akhirnya adalah dirinya sendiri. Sanksi terbesar dari pelanggaran moral bukanlah dari masyarakat, melainkan dari hati sanubari orang tersebut. "Ide ini", demikian Taylor, "tertanam sangat dalam di dalam kesadaran modern."¹⁴

13 *Ibid.* "Democracy has ushered in a politics of equal recognition, which has taken various forms over the years, and has now returned in the form of demands for the equal status of cultures and of genders."

14 *Ibid.*, 30. "This idea has burrowed very deep into modern consciousness."

Sebelum abad ke-18, jarang sekali filsuf yang memahami manusia dengan cara seperti ini. Namun setelah abad itu, ideal manusia berubah menjadi manusia yang otentik, yakni manusia yang jujur dan setia pada dirinya sendiri. Ia hidup lepas dari bayangan ataupun pendapat orang lain. Jika orang tidak bisa setia dan jujur pada dirinya sendiri, maka ia tidak layak disebut sebagai manusia yang utuh.

Musuh utama dari otentisitas diri adalah konformitas atau penyesuaian sosial yang berlebihan. Jika orang terlalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, maka secara perlahan tapi pasti, orang itu akan kehilangan jati dirinya. Ia kehilangan konteks dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, menurut Taylor, kita perlu “berkontak dengan diri kita sendiri dengan memperkenalkan prinsip keaslian: setiap suara kita memiliki sesuatu yang unik untuk disampaikan.”¹⁵ Orang tidak perlu melacurkan dirinya untuk menjadi budak masyarakat. Kebahagiaan dan kesejahteraan diri hanya dapat ditemukan di dalam diri pribadi setiap orang.¹⁶

Menurut Taylor otentisitas tidak hanya bisa diterapkan pada level individu. Masyarakat dan bangsa pun perlu untuk menjadi otentik dengan dirinya sendiri. Masyarakat dan bangsa harus jujur dan setia pada kultur yang mereka miliki. Orang Indonesia tidak perlu menjadi mirip orang Amerika. Orang Indonesia harus menemukan jalan mereka sendiri untuk maju dan sejahtera. Trauma sosial akibat penjajahan selama 300 tahun lebih harus ditatap dan digunakan untuk membentuk identitas bangsa sendiri yang lebih otentik. Konsep masyarakat atau bangsa yang otentik ini, yang berkembang sejak abad ke-18, nantinya akan menjadi awal bagi wacana terkait dengan nasionalisme.

Menurut Taylor berkembangnya ide martabat manusia (*human dignity*) dan otentisitas (*authenticity*) manusia berlangsung bersamaan dengan runtuhnya bentuk masyarakat tradisional kuno pada abad ke-18. Sebelum masa-masa itu, identitas seseorang melulu disamakan dengan identitas sosialnya di dalam masyarakat. Dengan muncul dan berkembangnya wacana tentang otentisitas diri, maka identitas seseorang tidak lagi disamakan melulu dengan identitas sosialnya, melainkan juga identitas yang terkait dengan pilihan individual orang tersebut.

15 *Ibid.* “... Self-contact by introducing the principle of originality: each of our voices has something unique to say.”

16 Saya telah melakukan penelitian mendalam tentang otentisitas dalam Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Manusia: Menjadi Manusia Otentik*, 2009, Catatan Kuliah, belum dipublikasikan. “Jelaslah bahwa berani untuk menjadi diri sendiri adalah sumber kebahagiaan. Berani untuk menjadi diri sendiri, apapun itu, adalah obat anti neurosis. Oleh karena itu pandangan ini layak menjadi tujuan hidup setiap orang. Walaupun begitu pandangan ini juga sangat sulit diwujudkan dalam realitas. Masyarakat dan dunia sosial keseluruhan mempunyai aturan dan tuntutan, yang seringkali menghalangi orang untuk menjadi dirinya sendiri.”

2.5 Identitas Dialogal

Namun menurut Taylor identitas manusia tidak pernah dibentuk di dalam kesendirian. "Untuk memahami relasi dekat antara identitas dan pengakuan," demikian tulisnya, "kita harus memperhitungkan ciri penting dari kondisi manusia...yakni karakternya yang bersifat dialogal."¹⁷ Konsep manusia di dalam filsafat modern, menurutnya, tidaklah tepat. Otentisitas tetap harus dibangun di dalam kaitannya dengan orang lain. Seseorang menjadi manusia utuh, mampu memahami diri dan dunianya, serta mampu mendefinisikan identitasnya, melalui ekspresi bahasa. Dan ekspresi bahasa itu pun sudah selalu tertanam di dalam dunia sosial.

Menurut Taylor bahasa tidak hanya terbatas pada tulisan dan kata-kata saja, melainkan juga mencakup simbol, seperti seni, musik, bahasa tubuh, dan sebagainya. Namun semua bentuk ekspresi bahasa tersebut terbentuk melalui relasi kita dengan orang lain. Bahasa tidak akan pernah ada, jika orang hidup sendirian. Hal yang sama berlaku untuk pikiran manusia. Pikiran manusia tidak terbentuk secara monologis, melainkan secara dialogis. Pikiran dan bahasa terbentuk melalui relasi kita dengan orang lain yang terus berlangsung dan berkembang sepanjang hidup. "Asal muasal dari pikiran manusia," demikian penegasan Taylor, "dalam arti ini tidaklah bersifat monologis, bukanlah sesuatu yang berhasil diciptakan secara sendiri, melainkan secara dialogis."¹⁸

Identitas kita sebagai manusia juga dibentuk dalam dialog, dan bahkan dalam konflik, dengan pandangan orang-orang lain terhadap diri kita sendiri. Bahkan walaupun orang-orang yang 'memandang' kita itu sudah meninggal, namun sosok mereka masih tetap tinggal dan membentuk identitas kita dalam bentuk kenangan. Dengan demikian pengaruh pandangan orang lain terhadap pandangan diri kita sendiri tetap berlanjut sepanjang waktu. "Adalah benar," demikian tulis Taylor, "bahwa kita tidak pernah bisa membebaskan diri kita sendiri secara utuh dari mereka yang mencintai dan merawat kehidupan awal kita..."¹⁹ Mereka yang sungguh mencintai kita tidak akan pernah mati. Walaupun begitu setiap orang haruslah berusaha mendefinisikan diri mereka sendiri semaksimal mungkin, dan menjaga jarak dari pengaruh orang tua, ataupun orang-orang lainnya yang berpengaruh di dalam hidup mereka.

17 Taylor, *op.cit.*, 32. "In order to understand the close connection between identity and recognition, we have to take into account a crucial feature of the human condition.... is its fundamentally dialogical character."

18 *Ibid.* "The genesis of the human mind is in this sense not monological, not something each person accomplishes on his or her own, but dialogical."

19 *Ibid.*, 33. "It is true that we can never liberate ourselves completely from those whose love and care shaped us early in life..."

“Kita membutuhkan suatu hubungan,” demikian penegasan Taylor, “untuk melengkapi, dan bukan untuk mendefinisikan, diri kita.”²⁰

Bagi beberapa orang konsep yang dijabarkan Taylor kelihatan berusaha membatasi kebebasan manusia, terutama orang-orang yang suka menyendiri untuk menemukan diri mereka sendiri, seperti para pertapa, ataupun seorang artis yang membutuhkan ketenangan untuk mendapatkan inspirasi. Namun menurut Taylor orang-orang ini pun sebenarnya hidup dalam relasi dialogal tertentu, seperti seorang pertapa dengan Tuhannya, dan seorang artis dengan karya seninya, atau dengan penikmat seni yang mengagumi kemampuannya. Dengan demikian tidak ada orang yang sungguh-sungguh bersifat monologis. Proses pembentukan identitas manusia selalu mengambil bentuk dialogal sepanjang hidupnya. “Identitas diri saya,” demikian Taylor, “secara penting tergantung pada relasi dialogis saya dengan yang lain.”²¹

2.6 Identitas dan Pengakuan

Walaupun selalu berusaha untuk mencapai otentisitas, namun identitas diri tidak pernah sungguh-sungguh otentik, karena selalu berada dalam relasi dependen dengan identitas diri orang-orang lainnya. Identitas diri manusia sudah selalu berakar di dalam dunia sosial. Maka dari itu identitas diri manusia tidak pernah sungguh-sungguh bebas. Menurut Taylor di dalam masyarakat tradisional, problem terkait dengan pengakuan tidak pernah muncul. Pengakuan secara otomatis diberikan melalui kelas-kelas sosial, di mana individu tidak pernah bisa sungguh memilih.

Namun pada era sekarang, pengakuan tidak diberikan begitu saja seturut dengan kelas sosial yang sudah ada, namun harus diperjuangkan. Dan perjuangan selalu memiliki dua kemungkinan, entah gagal atau berhasil. Dari sinilah muncul wacana sekaligus gerakan politik multikulturalisme yang pada esensinya adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. 300 tahun yang lalu, orang tidak akan membuat wacana tentang kaitan antara identitas dan pengakuan. Namun bukan berarti permasalahan itu tidak ada. Wacana itu tidak muncul, karena pengakuan sudah diberikan melalui kelas-kelas sosial tertentu secara otomatis dan diterima begitu saja.

Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan, bahwa identitas bisa sekaligus terbentuk atau hancur dalam relasi dengan identitas-identitas lainnya. Prinsip yang harus ditegaskan disini adalah, bahwa

20 *Ibid.* “We need relationships to fulfill, but not to define, ourselves.”

21 *Ibid.*, 34. “My own identity crucially depends on my dialogical relations with others.”

identitas setiap orang itu unik. Maka ia harus menjadi otentik dengan identitas tersebut. Setiap orang harus jujur dan teguh menjaga sekaligus mengembangkan identitas dirinya. Di dalam kerangka itu, pengakuan dari orang lain memiliki peran penting untuk keberadaan sekaligus perkembangan identitas diri setiap orang.

Tidaklah mengherankan jika Taylor berulang kali menegaskan, bahwa hubungan antar manusia justru semakin penting di dalam masyarakat yang orang-orangnya berusaha untuk mencapai otentisitas. "Hubungan-hubungan cinta tidak hanya penting karena penekanan umum dari budaya modern tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biasa..," demikian tulisnya, "Hubungan-hubungan cinta juga penting karena itu adalah elemen penting di dalam pembentukan identitas dari dalam."²² Cinta bukan hanya soal kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan untuk menegaskan dan mengembangkan identitas diri.

Hal yang sama kurang lebih berlaku di level sosial pada masyarakat ataupun bangsa. Identitas sosial juga bukanlah sesuatu yang sudah tertulis di atas batu takdir, melainkan sesuatu yang terbentuk dalam proses dialog terbuka. Maka dari itu pengakuan terhadap identitas sosial masing-masing kelompok yang unik tersebut juga menempati peran yang sangat penting. Masyarakat demokratis sendiri berdiri di atas premis, bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk diakui secara setara. Tanpa pengakuan semacam ini, identitas kelompok bisa musnah. Penolakan untuk mengakui keberadaan dan hak untuk berkembang suatu kelompok adalah suatu bentuk penindasan. Prinsip bahwa setiap kelompok memiliki identitas yang unik dan hak untuk hidup serta berkembang secara otentik menunjukkan semakin pentingnya penerapan politik pengakuan di dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari begitu banyak kelompok kultural dan sub-kultural.

Sampai sini kita bisa menyimpulkan setidaknya dua konsep politik pengakuan. *Yang pertama* pada level individual, proses penciptaan dan perkembangan identitas diri setiap orang selalu terjadi dalam proses dialog dan perjuangan yang berkelanjutan dengan orang-orang lainnya. Dan *yang kedua* pada level sosial, inti dari politik pengakuan adalah pengakuan yang seutuhnya terhadap cara hidup suatu kelompok yang unik dan otentik. Keberadaan dan kemampuan suatu kelompok untuk berkembang sangatlah tergantung dari pengakuan orang-orang maupun kelompok lainnya.

22 *Ibid.*, 35. "Love relationships are not just important because of the general emphasis in modern culture on the fulfillments of ordinary needs. They are also crucial because they are the crucibles of inwardly generated identity."

2.7 Dua Bentuk Politik

Fokus penelitian Taylor kemudian lebih ke arah filsafat politik. Pada masa sekarang menurutnya telah muncul dua perubahan besar di dalam filsafat politik. *Yang pertama* adalah perubahan penekanan dari konsep kehormatan yang sifatnya parsial-feodal menuju ke konsep martabat manusia yang sifatnya inklusif-universal-egaliter. Di dalam konsep martabat manusia, setiap orang memiliki martabat dan kedudukan yang setara di masyarakat. Tujuan politik pun berubah menjadi upaya untuk mewujudkan kesetaraan ini di tataran politik dan hukum. Inilah inti dari politik kesetaraan.

Namun itu adalah satu sisi dari cerita lainnya. “Bagi beberapa orang,” demikian tulis Taylor, “proses untuk menciptakan kesetaraan hanya mempengaruhi hak-hak sipil dan hak-hak suara di dalam politik; bagi orang-orang lainnya, proses itu sudah menyentuh ruang sosial ekonomi. Orang-orang yang secara sistem terbilang cacat oleh kemiskinan... dikutuk untuk menjadi status kelas kedua...”²³ Lepas dari kekurangan itu, prinsip politik kesetaraan yang memang sangat kental di dalam liberalisme telah diterima oleh banyak negara. Banyak kebijakan politik dibangun di atas dasar prinsip kesetaraan ini. Gerakan orang-orang kulit hitam di Amerika pada dekade 1960-an merupakan simbol nyata gerakan politik kesetaraan ini.

Bentuk *perubahan kedua* adalah lahirnya politik perbedaan. Bentuk politik ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan politik kesetaraan. Namun ada beberapa perbedaan yang sifatnya cukup mendasar. Prinsip dasar politik perbedaan adalah, bahwa setiap orang haruslah dikenali dan diakui sesuai dengan keunikan identitasnya. Politik perbedaan hendak mengenali identitas unik dari seseorang ataupun suatu kelompok, terutama identitas yang membuat orang atau kelompok tersebut unik dibandingkan dengan yang lainnya. Pandangan ini berbeda tajam dengan prinsip politik kesetaraan yang hendak bersikap netral terhadap semua bentuk pandangan hidup, dan hanya berfokus mewujudkan hak-hak dasar yang sifatnya universal saja.

“Idenya adalah,” demikian Taylor, “bahwa perbedaan yang ada telah diabaikan, digilas, dan diasimilasi ke dalam identitas dominan atau mayoritas. Dan asimilasi ini adalah dosa besar terhadap ideal otentisitas.”²⁴ Tuntutan dasar dari politik perbedaan sebenarnya sama

23 *Ibid.*, 38. “For some, equalization has affected only civil rights and voting rights; for others, it has extended into the socioeconomic sphere. People who are systematically handicapped by poverty... are deemed on this view to have been relegated to second-class status.”

24 *Ibid.* “The idea is that it is precisely this distinctness that has been ignored, glossed over, assimilated to a dominant or majority identity. And this assimilation is the cardinal sin against the ideal of authenticity.”

dengan politik kesetaraan, yakni prinsip kesetaraan universal. Namun politik perbedaan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang pada akhirnya bisa membuat kelompok tersebut digolongkan sebagai warga negara kelas dua. Dan pada akhirnya politik kesetaraan dan politik perbedaan tidak pernah bisa berjalan berbarengan. Politik perbedaan justru hendak mengakui nilai-nilai yang tidak diakui secara universal. Sementara politik kesetaraan hendak bersikap netral terhadap semua bentuk nilai-nilai partikular yang ada, dan hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak universal, seperti hak sosial dan ekonomi. Taylor menyebut politik perbedaan ini sebagai, "Kekuatan tuntutan universal untuk memberikan pengakuan pada keunikan."²⁵

Secara historis menurut Taylor, politik perbedaan berkembang dari politik kesetaraan. Perkembangan ini terjadi akibat perubahan pemahaman tentang kodrat manusia. Di dalam politik kesetaraan, manusia adalah entitas universal yang bersifat pucat terhadap kultur. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang bersifat universal, persis karena setiap manusia adalah suatu entitas yang bersifat universal. Namun di dalam politik perbedaan, manusia adalah entitas yang terbentuk melalui dialog dengan manusia-manusia lainnya dalam suatu kerangka sosial kultural tertentu. Proses dialog tersebut bisa berhasil, sehingga menghasilkan identitas yang unik dan otentik. Namun proses dialog bisa gagal, sehingga identitas terkait tidak bisa berkembang, atau justru mengalami kehancuran.

"Ketika politik kesetaraan martabat universal berjuang untuk bentuk non diskriminasi yang cukup buta terhadap perbedaan warga negara," demikian tulis Taylor, "politik perbedaan seringkali mendefinisikan ulang non diskriminasi sebagai upaya yang membutuhkan supaya kita menjadikan perbedaan sebagai dasar dari perbedaan perlakuan."²⁶ Dibahasakan secara sederhana politik kesetaraan hendak bersikap netral terhadap perbedaan cara hidup, sementara politik perbedaan justru hendak mengakui dan mengembangkan perbedaan cara hidup tersebut, dan menjadikannya sebagai titik tolak bagi kebijakan politis. Maka suku Badui di Jawa Barat akan memperoleh hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh suku-suku lainnya di Indonesia. Dan kelompok-kelompok minoritas lainnya berhak mendapatkan hak untuk mengembangkan kebudayaan partikularnya yang memang berbeda dari kebudayaan kelompok dominan.

25 *Ibid.*, 39. "The universal demand powers an acknowledgment of Specificity."

26 *Ibid.*, 39. "Where the politics of universal dignity fought for forms of nondiscrimination that were quite 'blind' to the ways in which citizens differ, the politics of difference often redefines nondiscrimination as requiring that we make these distinctions the basis of differential treatment."

Tentu saja bagi mereka yang mendukung pandangan politik kesetaraan, prinsip-prinsip yang ada di dalam politik perbedaan adalah suatu kekeliruan besar. Berdasarkan pandangan politik kesetaraan, jika suatu kelompok diperbolehkan menampilkan identitas kelompoknya secara partikular dan unik, dan pemerintah yang berkuasa mengakuinya, maka itu adalah sebetulnya keberpihakan pada kelompok tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan diskriminasi. Di Amerika Serikat beberapa kebijakan politik sudah dibuat dengan mengacu pada prinsip politik perbedaan. Salah satu contohnya adalah penyediaan kuota di perguruan tinggi ataupun pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan akibat pengaturan sistem yang tidak adil dengan mengacu pada politik kesetaraan.

“Praktek ini,” demikian tulis Taylor, “telah dibenarkan dengan dasar bahwa diskriminasi historis telah menciptakan pola di dalam yang tidak berpihak pada perjuangan yang tidak mampu.”²⁷ Jika saya tidak salah menafsirkan apa yang ditulis Taylor, ia sebenarnya ingin mengatakan, bahwa orang tidak pernah mulai dari titik yang sama. Akibatnya kesetaraan seringkali hanya menjadi argumen yang menutupi fakta ketidaksetaraan sesungguhnya yang terjadi akibat penindasan selama berabad-abad terhadap suatu kelompok tertentu. Prinsip kenetralan tidak akan pernah bisa menjamin keadilan, karena orang ataupun kelompok tidak pernah memulai dari satu titik yang benar-benar setara. Maka dari itu sekarang ini politik tidak lagi berpijak pada kesetaraan netral semata-mata, melainkan harus mulai peka dan mengakui perbedaan kultural kelompok-kelompok yang minoritas “tidak hanya sekarang, tetapi selamanya.”²⁸

2.8 Tegangan Lebih Jauh

Dengan demikian sekali lagi, fokus politik kesetaraan adalah hak-hak universal. Sementara fokus dari politik perbedaan adalah identitas partikular yang unik. Taylor lebih jauh berpendapat, bahwa ide dasar politik kesetaraan adalah bahwa semua orang berhak mendapatkan penghormatan atas harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Seperti sudah disinggung sebelumnya, pengandaian konsep manusia di dalam politik kesetaraan bersifat metafisik. Akar dari pandangan ini berada di dalam filsafat Kant, terutama ketika ia mengatakan, bahwa manusia adalah subyek rasional yang mampu mengatur hidupnya melalui prinsip-

27 *Ibid.*, 40. “This practice has been justified on the grounds that historical discrimination has created a pattern within which the unfavored struggle at a disadvantage.”

28 *Ibid.* “The goal of which is not to bring us back to an eventual “difference-blind” social space but, on the contrary, to maintain and cherish distinctness, not just now but forever.”

prinsip. "Suatu konsep seperti ini," demikian Taylor, "telah menjadi dasar dari intuisi kita mengenai martabat yang setara sejak dulu, walaupun definisi detilnya telah berubah."²⁹

Maka setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati, lepas dari suku, ras, etnis, ataupun agamanya. Harkat martabat yang tidak bisa dilepaskan inilah yang membuat setiap orang layak untuk dihormati. Orang-orang cacat pun memiliki harkat dan martabat ini tanpa terkecuali. Politik perbedaan sebenarnya juga bergerak dengan logika yang kurang lebih sama. Setiap orang memiliki harkat dan martabat universal. Lebih dari itu setiap orang memiliki identitas yang unik sebagai individu, dan sebagai bagian dari kelompok tertentu.

Tidak hanya bagi individu, setiap kelompok pun memiliki harkat dan martabat yang universal yang harus dihormati keunikannya. "Potensialitas ini," demikian Taylor, "haruslah dihormati secara setara oleh semua orang."³⁰ Di dalam politik perbedaan, tuntutan politik atas pengakuan identitas kelompok yang partikular semakin besar. Budaya dan cara berpikir Eropa telah lama menjadi dominan di seluruh dunia, sehingga menutup kesempatan bagi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan hidup yang berbeda untuk berkembang. Cara berpikir Eropa telah dianggap gagal dalam memberi tempat yang seharusnya bagi pandangan hidup lainnya yang tersebar di seluruh dunia.

Di dalam tulisan-tulisannya terasa sekali, bahwa Taylor adalah pendukung politik perbedaan. Memang politik kesetaraan dan politik perbedaan memiliki dasar yang sama, yakni penghormatan terhadap pandangan hidup setiap orang. Namun politik kesetaraan memilih untuk bersikap netral dan buta terhadap perbedaan cara hidup, dan lebih fokus pada perwujudan hak-hak dasar yang sifatnya universal. Sementara politik perbedaan berfokus untuk mengenali, mengakui, dan bahkan merawat pandangan hidup yang partikular, yang berbeda dengan pandangan hidup kelompok dominan.

Kedua bentuk politik itu bermusuhan pada titik ini. Dari sudut politik kesetaraan, pandangan politik pengakuan bersifat diskriminatif. Sementara dari sudut politik perbedaan, pandangan politik kesetaraan menghancurkan identitas yang sifatnya partikular dan minoritas dengan memaksanya untuk menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Bagi Taylor politik kesetaraan setidaknya memiliki dua cacat. *Yang pertama* seringkali sikap netral politik kesetaraan tidak pernah netral di dalam realitas, dan lebih mencerminkan cara berpikir dan kelompok budaya

29 *Ibid.*, 41. "Something like this has been the basis for our intuitions of equal dignity ever since, though the detailed definition of it may have changed."

30 *Ibid.*, 42. "This potentiality must be respected equally in everyone."

dominan. Yang kedua akibatnya kelompok minoritas, yang memiliki cara pandang yang berbeda, dipaksa untuk menyesuaikan diri dan akhirnya kehilangan keunikan maupun otentisitas mereka sebagai kelompok. "Konsekuensinya," demikian tulisnya, "masyarakat buta pada perbedaan yang seharusnya adil tidak hanya menjadi tidak manusiawi (karena telah menekan identitas) tetapi juga, dalam bentuk yang lembut dan tidak sadar, ternyata sangat diskriminatif."³¹

Di dalam wacana politik, pandangan politik kesetaraan seringkali juga disebut sebagai liberalisme. Di balik prinsip ini terdapat satu asumsi yang sebenarnya belum diuji secara kritis, bahwa ada satu bentuk pemikiran yang bersifat universal dan mampu menjadi penengah dari beragam bentuk pemikiran lainnya. Pemikiran itu sifatnya buta dan netral terhadap perbedaan pemikiran-pemikiran lainnya. Asumsi ini seringkali dipegang secara buta dan tidak lagi dipertanyakan. Namun dari sudut pandang politik perbedaan, prinsip liberalisme yang kental di dalam politik kesetaraan tidak sungguh netral dan buta pada perbedaan. Justru liberalisme adalah salah satu bentuk pandangan hidup saja yang mencerminkan pandangan dunia suatu kelompok dominan. "Pemikiran yang mengkhawatirkan adalah," demikian Taylor, "...ide dasar dari liberalisme adalah suatu kontradiksi pragmatis, suatu bentuk partikularisme yang disembunyikan sebagai sesuatu yang universal."³²

Premis yang ditawarkan Taylor untuk mempertahankan politik perbedaan adalah, bahwa setiap kebudayaan, dengan cara berpikirnya yang unik, selalu memiliki nilai intrinsik yang membuatnya berarti. Untuk mempertahankan argumen tersebut, ia mengutip argumen yang pernah diutarakan oleh Herder, bahwa setiap bentuk kebudayaan, dengan pandangan dunianya masing-masing, bisa ada karena suatu alasan, dan bukan sebuah kebetulan. Alasan keberadaan begitu banyak beragam budaya adalah memperkaya kehidupan manusia itu sendiri. Pada tataran yang lebih profan, "kita dapat berargumen bahwa adalah masuk akal bahwa kebudayaan yang telah menyediakan horison makna bagi sejumlah besar manusia, dari berbagai karakter dan tempramen, dalam jangka waktu yang lama – yang telah, dengan kata lain, mengartikulasikan konsep mereka tentang yang baik, yang kudus, yang layak dihormati – adalah hampir pasti layak mendapatkan penghormatan dari

31 *Ibid.*, 43. "Consequently, the supposedly fair and difference-blind society is not only inhuman (because suppressing identities) but also, in a subtle and unconscious way, itself highly discriminatory."

32 *Ibid.* "And the worrying thought is that this bias might not just be a contingent weakness of all hitherto proposed theories, that the very idea of such a liberalism may be a kind of pragmatic contradiction, a particularism masquerading as the universal."

kita, walaupun itu seringkali ditemani oleh hal-hal yang kita benci dan tolak.”³³

Dalam hal ini Taylor mulai memasuki area filsafat moral. Ia menyatakan dengan tegas, bahwa orang tidak bisa menolak nilai berharga dari setiap kebudayaan yang telah memberikan horison makna bagi begitu banyak orang. Jika orang menolaknya maka itu adalah bukti adanya arogansi ekstrem yang tertanam di dalam diri orang itu. Yang dibutuhkan adalah cara pandang baru di dalam memandang kelompok-kelompok minoritas yang memiliki pandangan hidup yang berbeda, yakni bahwa peran kita, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, terbatas di dalam sejarah manusia yang begitu luas. Hanya arogansi kosong dan semu yang membuat kita tidak bisa melihat ‘nilai’ di dalam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dari kita. Menurut Taylor untuk bisa hidup secara harmonis dan dinamis di dalam masyarakat majemuk yang memiliki begitu banyak pandangan hidup, kita perlu bersikap terbuka pada berbagai pandangan dan cara hidup, terutama cara hidup yang bisa mengembangkan cakrawala pengetahuan kita.

3. Politik Pengakuan dan Multikulturalisme untuk Indonesia

Menurut Charles Taylor esensi dari seluruh wacana dan gerakan politik multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, yakni pengakuan akan keberadaan berbagai kelompok dengan pandangan hidup yang berbeda-beda, dan kebijakan politik yang mampu memungkinkan kelompok-kelompok tersebut tumbuh dan berkembang, lepas dari keterbatasan serta keunikan identitas yang dimiliki masing-masing kelompok. Pada hemat saya argumen yang ditawarkan Taylor tersebut sangat tepat dan relevan untuk Indonesia. Untuk bisa mengelaborasi argumen ini lebih jauh, ada baiknya saya menjabarkan kondisi-kondisi empiris Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengkaji satu per satu kondisi empiris tersebut dengan kerangka teori multikulturalisme dan politik pengakuan yang dirumuskan oleh Charles Taylor.

3.1 Dasar Filosofis Indonesia

Sebagaimana tertera di dalam situs resmi Pemerintah Republik In-

33 *Ibid.*, 73. “one could argue that it is reasonable to suppose that cultures that have provided the horizon of meaning for large numbers of human beings, of diverse characters and temperaments, over a long period of time—that have, in other words, articulated their sense of the good, the holy, the admirable—are almost certain to have something that deserves our admiration and respect, even if it is accompanied by much that we have to abhor and reject.”

donesia,³⁴ dasar filosofis negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diterjemahkan ke dalam lima pernyataan yang menjadi dasar dari negara Indonesia, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibahasakan secara sederhana kelima konsep itu menyiratkan diakuinya nilai-nilai ketuhanan monoteistik, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dalam bentuk perwakilan rakyat untuk menghasilkan undang-undang dan kebijakan politik, serta keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat.

Dari sudut pandang teori politik pengakuan dan multikulturalisme Charles Taylor, Indonesia masih belum menerima keberagaman dalam hal agama. Padahal agama adalah elemen pembentuk identitas yang sangat kuat bagi penganutnya. Indonesia hanya menerima monoteisme, yakni keyakinan akan adanya satu Tuhan. Tidak hanya itu agama-agama besar di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha pun seringkali tidak bisa bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dalamnya. Kasus Ahmadiyah masih segar di ingatan bangsa kita. Betapa para pemuka dan penganut agama-agama monoteis besar tidak bisa memberikan tempat bagi bentuk ekspresi agama yang lain di dalam agamanya masing-masing.

Setiap agama mungkin memiliki klaim kebenaran absolutnya masing-masing dan sulit sekali untuk terbuka pada perubahan dan perbedaan. Teori dan gerakan politik multikulturalisme mungkin tidak bisa mencairkan klaim kebenaran absolut tersebut. Namun teori dan gerakan politik multikulturalisme bisa membuat setiap agama berefleksi lebih jauh tentang klaim kebenaran absolut mereka, dan kontekstualisasinya di zaman yang terus berubah ini. Harapan terjauhnya adalah teori dan gerakan multikulturalisme bisa membuat wajah agama menjadi lebih ramah dan manusiawi, karena memang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dalam relasinya dengan Allahlah agama itu ada.

Bangsa Indonesia dengan tegas menyatakan, bahwa kemanusiaan adalah dasar negara yang tidak bisa diganggu gugat. Kemanusiaan bersifat adil dan mengendapkan pendidikan sebagai bagian dari proses pemberadaban. Dalam arti ini teori dan gerakan politik multikulturalisme bisa berjalan searah dengan dasar filosofis bangsa Indonesia. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Charles Taylor berpendapat bahwa manusia adalah entitas yang memiliki identitas yang unik. Keunikan tersebut harus diakui dan dikembangkan, sehingga setiap orang bisa menjadi dirinya

34 Pada sub bab ini, saya mengacu pada situs resmi Pemerintah Republik Indonesia: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722, diakses pada 13 Oktober 2009, pk. 12.35.

sendiri yang otentik. Dapat pula dikatakan bahwa otentisitas diri manusia adalah dasar antropologis dari wacana politik pengakuan dan multikulturalisme yang dikembangkan oleh Charles Taylor. Filsafatnya bisa memberikan kontribusi terhadap pemaknaan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kemanusiaan setiap orang harus dihargai dan dikembangkan dalam keunikan identitas individu ataupun kelompoknya masing-masing. Inilah kemanusiaan versi multikulturalisme Charles Taylor yang kiranya bisa memperkaya dasar filosofis bangsa Indonesia.

Dalam konteks demokrasi perwakilan yang dianut oleh bangsa Indonesia, teori dan gerakan politik multikulturalisme kiranya bisa memberikan beberapa hal yang dapat mengembangkan demokrasi tersebut. Konsep parlemen multikultural kiranya bisa menjadi alternatif untuk pemerintahan kita. Sekarang ini di Indonesia, perwakilan rakyat masih didasarkan hanya kepada teritori provinsi saja. Di dalam sistem ini, kelompok-kelompok minoritas yang memiliki identitas partikular sering tidak mendapatkan perwakilan di lembaga legislatif. Kepentingan mereka terpinggirkan. Dalam konteks teori multikulturalisme yang dikembangkan Taylor, identitas kelompok minoritas partikular tidak mendapatkan pengakuan, sehingga keberadaan dan perkembangan mereka bisa terhambat.

Inti dari konsep parlemen multikultural adalah, bahwa setiap kelompok yang ada di Indonesia memiliki perwakilannya langsung di parlemen atau lembaga legislatif. Tugas mereka adalah menyalurkan suara masing-masing kelompok untuk menciptakan keputusan yang didasarkan atas kepentingan bersama pada akhirnya. Kelompok tersebut tidak hanya terbatas pada teritori, suku, ataupun agama semata, melainkan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan hidup yang unik serta partikular. Seperti yang berulang kali ditulis oleh Taylor, keunikan pandangan hidup bukanlah untuk disingkirkan, melainkan untuk diakui dan dikembangkan. Setiap pandangan hidup partikular yang mewujud di dalam individu dan kelompok berhak untuk bangga atas identitasnya sendiri, dan hidup dalam iklim otentisitas.

Teori multikulturalisme dan politik pengakuan yang dikembangkan Taylor bisa memperkaya konsep keadilan sosial yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia. Keadilan sosial bukan lagi soal ekonomi semata, melainkan soal kultural. Inilah yang disebut sebagai keadilan kultural, yakni keadilan yang diberikan kepada setiap kelompok partikular untuk hidup dan berkembang dengan mengacu pada keunikan identitasnya masing-masing. Di dalam konsep keadilan kultural, keadilan ekonomi sudah tercakup. Jika konsep keadilan sosial yang menjadi dasar dari negara Indonesia masih menganut pandangan politik kesetaraan, maka keadilan kultural bergerak lebih jauh dengan memberikan pengakuan

serta dukungan bagi setiap orang maupun kelompok untuk hidup otentik sesuai dengan keunikan identitas partikularnya masing-masing, dan bertumbuh di dalam keharmonisan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diperkaya menjadi keadilan sosial kultural bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2 Kondisi Geografis dan Demografis Indonesia

Indonesia memiliki 17.508 pulau. Fakta ini membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Letak Indonesia adalah antara benua Asia dan Australia. Wilayah Indonesia terbentang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Luas Indonesia sendiri mencapai 1,9 juta mill persegi. Indonesia memiliki lima pulau besar, yakni Sumatera seluas 473.606 km persegi, Jawa seluas 132.107 km persegi, Sulawesi seluas 189.216 km persegi, Papua seluas 421.981 km persegi, dan Kalimantan yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia seluas 539.460 km persegi. Tentu saja pengaruh lokasi ini sangat besar bagi kehidupan politik, ekonomi, maupun budaya di Indonesia. Kemajemukan suku, ras, etnis, agama, dan pandangan-pandangan hidup menjadi sesuatu yang dengan mudah ditemukan di dalam keseharian masyarakat Indonesia.

Secara sederhana penduduk Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Suku Melayu banyak menempati Indonesia bagian Barat. Sementara suku Papua menempati Indonesia bagian Timur. Leluhur suku Papua banyak berasal dari kepulauan Melanesia. Di Indonesia bagian Barat, banyak suku yang merasa memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dari suku Melayu, seperti Jawa, Sunda, dan Batak. Tidak hanya itu, etnis Tionghoa, Arab, dan India juga menjadi bagian dari negara Indonesia, walaupun jumlahnya terhitung minoritas. Mereka datang melalui jalur perdagangan yang dibuka sejak abad 8 SM.

Islam adalah agama mayoritas. Sekitar 85% penduduk Indonesia memeluk agama tersebut. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Penduduk lainnya beragama Kristen (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lainnya (0,3%). Mayoritas orang Indonesia berkomunikasi dengan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Namun di beberapa tempat, masyarakat masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa percakapan sehari-hari.

Melihat data itu kita bisa langsung menarik kesimpulan, bahwa kemajemukan adalah fakta nyata di kehidupan bangsa Indonesia. Yang penting adalah bagaimana menata kemajemukan tersebut, sehingga

setiap orang dan setiap kelompok bisa mengembangkan dirinya masing-masing secara otentik, yakni mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada hemat saya teori multikulturalisme bisa membuat kita lebih peka tentang keberadaan sub-sub etnis, agama, kelompok yang berada di dalam kelompok-kelompok besar yang telah saya sebutkan di atas. Agama Islam misalnya. Ada beberapa aliran besar dan banyak aliran kecil di dalam Islam, dan masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Suku Melayu pun bukanlah suku tunggal, melainkan memiliki banyak sub-sub suku yang tersebar dengan keunikan identitasnya masing-masing.

Yang juga perlu diperhitungkan adalah keberadaan individu ataupun kelompok yang memiliki identitas sosial yang tumpang tindih, seperti sekaligus beragama Islam, orang Papua, dan memiliki rekan ataupun saudara yang beragama Hindu sekaligus orang Papua. Tumpang tindih atau persilangan identitas tersebut adalah fakta nyata kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Dan seperti yang ditegaskan Taylor, setiap kelompok identitas, yang memang begitu beragam akibat persilangan identitas, memiliki keunikan pandangan dunianya sendiri yang harus diakui dan dikembangkan secara otentik dalam relasinya dengan kelompok-kelompok identitas lainnya. Taylor di dalam tulisannya memang belum menyitir soal sub-sub kelompok dan persilangan identitas yang begitu sering terjadi di dalam masyarakat majemuk multikultur. Namun secara logis bisa diandaikan, bahwa ia akan menanggapi fenomena tersebut secara koheren dengan kerangka teori yang telah dibangunnya.

Adanya begitu banyak kelompok identitas yang tersebar di seluruh Indonesia juga melahirkan begitu banyak budaya dengan ciri khasnya masing-masing. Dalam hal ini budaya memiliki dua arti. *Yang pertama* adalah budaya sebagai kultur, yakni keseluruhan cara berpikir, horizon makna, serta nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kelompok dan tercermin di dalam tindakan anggotanya sehari-hari. Dan *yang kedua* budaya sebagai produk kultural yang tercermin di dalam lagu, tarian, pakaian, makanan, dan bahasa khas masing-masing kelompok. Dalam kedua pemahaman ini, Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Kekayaan kultural ini bisa berpotensi merusak, namun juga bisa memperkuat identitas masing-masing, dan mencapai kehidupan bersama yang harmonis sekaligus dinamis.

Teori multikulturalisme yang ditawarkan Taylor kiranya bisa memberikan pencerahan pada kita, bahwa kelompok kultural yang memiliki identitas unik tersebut haruslah saling mengakui keberadaan satu sama lain, dan secara bersama berusaha mengembangkan potensi masing-masing. Semua kelompok kultural yang unik, yang memiliki pandangan hidup yang khas, harus bertindak dengan satu pengandaian dasar, bahwa semua orang dan semua kelompok kultural memiliki nilai

keluhurannya masing-masing. Ketidakmampuan untuk berpikir dengan pengandaian ini menandakan masih bercokolnya arogansi kultural. Konflik antar kelompok biasanya diawali dengan adanya arogansi kultural yang kemudian menajam menjadi tindakan kekerasan terhadap kelompok lainnya.

Taylor juga mengingatkan bahwa identitas itu sifatnya dialogal. Artinya identitas individu dan kelompok itu terbentuk dan berkembang dalam hubungannya dengan identitas individu dan kelompok lainnya. Terjadi simbiosis mutualisme antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, atau antara individu yang satu dengan individu lainnya, yang menegaskan sekaligus mengembangkan identitas masing-masing. Dalam kerangka berpikir ini, kemajemukan adalah suatu potensi besar untuk mendorong penegasan sekaligus pengembangan identitas. Kelompok-kelompok kultural di Indonesia harus berani memeluk pandangan ini, sehingga kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis bisa terwujud.

Bangsa Indonesia pernah hidup di bawah penjajahan negara-negara Eropa kurang lebih 350 tahun. Penjajahan tersebut meninggalkan trauma sosial yang begitu besar, yang pada akhirnya merusak citra diri orang-orang Indonesia. Citra diri disini bukanlah *image* publik semata, melainkan bagaimana orang Indonesia mempersepsi dirinya sendiri. Bangsa penjajah mencap Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, pemalas, korup, dan mudah dipecah belah. *Stereotype* semacam itu tidak hanya diyakini oleh bangsa penjajah, tetapi juga oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai *self-image*, atau citra diri.

Taylor berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang pernah dijajah haruslah melepaskan diri dari gambaran jelek yang dibuat oleh penjajah tentang diri mereka sendiri. Bangsa Indonesia pun harus berani melakukan hal yang sama. Kita harus melepaskan diri dari gambaran yang dibuat penjajah selama 350 tahun, dan berani secara otentik merumuskan identitas bangsa sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa menjadi bangsa multikultural, di mana setiap orang dan kelompok yang hidup di dalamnya bisa otentik dan mengembangkan identitas dirinya semaksimal mungkin.

2.3 Kondisi Politik dan Ekonomi³⁵

Sistem politik Indonesia adalah Trias Politika, yakni pemisahan kekuasaan legislatif (pembuat hukum), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan yudikatif (lembaga penjamin terlaksananya hukum). Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga ini terdiri dari

35 Seluruh uraian terkait pemaparan data politis, saya dasarkan pada *ibid*.

dua badan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari perwakilan partai politik, dan Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri dari anggota-anggota yang mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. Setiap provinsi memiliki 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu, dan menjabat selama lima tahun. Anggota MPR kini terdiri dari 550 anggota DPR, dan 128 anggota DPD. Ini adalah sistem bikameral, yakni DPR sebagai kamar pertama, dan DPD sebagai kamar kedua.

Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan kabinet. Di Indonesia sistem kabinet yang digunakan adalah kabinet presidensial. Artinya para menteri di dalam kabinet bertanggungjawab langsung kepada presiden, dan tidak dipilih oleh partai politik yang ada di parlemen. Lembaga Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA juga memiliki kekuasaan untuk memilih para hakim. Secara administratif Indonesia memiliki 33 propinsi, 2 daerah istimewa (Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta), dan satu ibu kota (Daerah Khusus Ibu kota Jakarta).

Sejak krisis moneter pada akhir dekade 1990-an, ekonomi Indonesia mengalami penurunan tajam. Walaupun dampak dari krisis masih terasa, seperti bergolaknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, namun kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini relatif stabil. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam sangat besar, Indonesia aktif menjadi pengekspor minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Bahkan Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Di samping itu Indonesia juga aktif mengekspor beras, teh, kopi, karet, dan rempah-rempah. Walaupun memiliki sumber daya alam berlimpah dan jumlah penduduk yang besar, kemiskinan masih menjadi masalah terbesar negara Indonesia. Penyebab utamanya adalah korupsi yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan.

Pada hemat saya pengandaian filosofis yang mendasari sistem politik Indonesia adalah politik kesetaraan. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk bersikap netral dan imparial di hadapan berbagai kelompok kultural yang ada. Walaupun pada praktiknya prinsip netralitas dan imparialitas ini sering dilanggar, dan menciptakan diskriminasi di berbagai bidang. Sistem politik Indonesia adalah bentuk kabinet presidensial maupun parlemen dengan dua kamar pun masih berpijak pada pengandaian politik kesetaraan. Sekilas dilihat ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik, karena membuka kesempatan bagi setiap kelompok untuk eksis di masyarakat. Namun prinsip imparialitas dan netralitas itu sering menjadi selubung yang menutupi fakta ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas yang tidak memiliki sumber daya cukup besar untuk mempertahankan dan mengembangkan identitasnya.

Taylor menulis bahwa kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat tidak pernah mulai dari garis *start* yang sama. Kelompok dominan selalu mulai dengan garis lebih depan. Sementara kelompok minoritas baik dalam hal ideologi maupun sumber daya selalu berada di garis belakang. Jika pemerintah memilih bersikap netral, maka yang terjadi adalah kelompok minoritas akan terus tertinggal, dan kelompok mayoritas akan semakin berkuasa. Pada akhirnya kelompok minoritas terpaksa harus melepaskan identitas partikularnya yang unik, dan memeluk identitas mayoritas. Mereka tidak bisa hidup secara otentik dengan identitas partikularnya.

Dengan mengacu pada teori multikulturalisme yang dikembangkan Taylor, MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, haruslah mampu menampung suara dan kepentingan semua kelompok identitas partikular yang hidup di Indonesia. Tujuannya adalah supaya tidak ada satupun kelompok identitas partikular yang mengalami diskriminasi, dan pada akhirnya bermuara pada hancurnya identitas partikular mereka. Semua kelompok identitas partikular memiliki nilai pada dirinya sendiri. Argumen ini harus diterapkan, baik di tataran legal maupun politis. Jika semua kelompok memiliki nilai berharga pada dirinya sendiri, maka mereka harus diberi ruang politis untuk mempertegas sekaligus mengembangkan identitasnya di dalam masyarakat.

Ruang politis itu mencakup ruang-ruang yang ada di dalam masyarakat, terutama pers, maupun ruang legal politis yang diberikan secara konkret dalam bentuk kursi di MPR, baik melalui partai politik maupun melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Keberadaan ruang-ruang politis tersebut haruslah dijamin oleh hukum dan UU yang memadai. Tanpa itu semua wacana multikulturalisme hanya akan menjadi buah retorika yang mengambang tanpa realitas. Jika wacana multikulturalisme tidak menemukan akarnya di dalam realitas, maka yang terjadi adalah hancurnya identitas kelompok-kelompok kultural partikular. Ini bisa berarti dua hal.

Yang pertama Indonesia sudah berubah menjadi masyarakat yang tertutup dan totaliter, di mana semua perbedaan ditindas atas nama kesamaan. *Yang kedua* Indonesia menjadi bangsa yang miskin secara kultural, karena begitu banyak identitas partikular hancur, karena dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan identitas dominan. Padahal identitas partikular adalah horison makna dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jika horison tersebut lenyap, maka orang tersebut akan mengalami krisis identitas. Krisis identitas bisa bermuara ke berbagai hal, seperti kecenderungan depresi yang tinggi, sensitivitas sosial yang meningkat ke taraf ekstrem (yang membuat peluang untuk terjadinya konflik semakin besar), sampai berbagai gejala neurosis yang berakar pada ketidakbahagiaan orang di dalam menjalani hidupnya. Jika banyak individu

yang mengalami krisis identitas semacam itu, maka integritas Indonesia sebagai bangsa juga terancam musnah. Jika sudah begitu Indonesia mungkin tinggal menjadi wacana tanpa fakta.

Di tataran ekonomi Indonesia harus mulai melihat kultur sebagai potensi yang bisa digali sebagai bentuk penegasan identitas sekaligus sebagai bagian dari industri kreatif yang bisa menarik konsumen dari seluruh dunia. Industri kreatif ini meliputi pariwisata, sampai berkembangnya penelitian-penelitian kultural yang menegaskan sekaligus mengembangkan kekayaan kultural bangsa, sehingga menjadi bahan kajian yang memperkaya refleksi dan analisis dari berbagai disiplin ilmu. Berbeda seperti produk lainnya, yang akan lenyap jika diberikan ke orang lain, kultur dan ilmu justru akan semakin berkembang, jika menjadi bahan kajian dan ketertarikan pihak lain. Kultur adalah komoditi ekspor yang justru akan semakin bertambah, ketika kita menyerahkannya sebagai bahan apresiasi sekaligus kajian kultural yang memperkaya peradaban manusia secara universal. Horison makna, nilai, serta pandangan hidup yang dimiliki beragam kelompok identitas partikular di Indonesia akan semakin luas dan luhur, ketika itu semua berinteraksi dalam iklim otentisitas dan penghormatan satu sama lain, baik dengan kultur nasional, maupun kultur asing.

4. Kesimpulan dan Tanggapan Kritis

Pada hemat saya teori Charles Taylor tentang politik pengakuan dan multikulturalisme bisa mendorong Indonesia menjadi komunitas yang bermakna. Di dalam komunitas yang bermakna ini, setiap pandangan hidup dan keyakinan akan nilai diakui dan dikembangkan dalam relasinya dengan pandangan hidup dan keyakinan-keyakinan lainnya. Pandangan ini berakar pada kesadaran yang sangat mendasar tentang akar terdalam manusia, bahwa identitas setiap orang itu terbentuk dalam dialog tanpa henti dengan identitas orang-orang lainnya, dan bahwa identitas setiap orang ataupun kelompok itu bernilai pada dirinya sendiri.

Di dalam dialog selalu terdapat dua kemungkinan, yakni berhasil atau gagal. Keberhasilan membangun dialog antar identitas, baik individu ataupun kelompok, akan menegaskan sekaligus mengembangkan semua pihak yang terkait. Sebaliknya kegagalan dialog antar identitas akan menghancurkan keunikan-keunikan identitas yang ada. Jika identitas hancur maka eksistensi pribadi seseorang pun akan terancam. Indonesia sebagai komunitas yang bermakna harus menerapkan kebijakan-kebijakan politik dengan mengacu terus pada fakta keberagaman identitas dan pengakuan atasnya. Tanpa itu Indonesia akan kehilangan maknanya sebagai bangsa.

Namun saya memiliki tiga pertanyaan kritis yang kiranya bisa menjadi bahan kajian lebih jauh, guna memperkaya wacana

multikulturalisme dan politik pengakuan dalam konteks Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis. Taylor mengatakan dengan tegas, bahwa masyarakat secara keseluruhan haruslah terbuka di dalam proses pengakuan dan pengembangan identitas-identitas partikular. Setiap individu ataupun kelompok berhak untuk hidup seturut dengan nilai-nilai yang diyakininya dalam relasi dengan individu ataupun kelompok lainnya. Inilah inti dari konsep otentisitas di dalam kehidupan individual maupun kelompok. Namun apakah yang dimaksud dengan identitas? Mengapa dan bagaimana identitas itu terbentuk?

Di dalam tulisannya Taylor tidak membahas masalah itu secara mendalam. Ia hanya mengandaikan bahwa identitas adalah 'siapa' dan 'dari mana' orang ataupun kelompok terkait. Ia juga hanya menegaskan bahwa identitas adalah sesuatu yang dibentuk secara dialogal. Pada hemat saya pemahaman ini kurang lengkap. Identitas haruslah dipahami sebagai suatu konstruksi ingatan sosial yang sudah berlangsung selama beberapa generasi. Pada titik ini teori politik pengakuan dan multikulturalisme Charles Taylor haruslah dilengkapi dengan analisis secara mendalam tentang ingatan sosial yang membentuk identitas individu ataupun kelompok. Teori politik pengakuan dan multikulturalisme, yang diperkaya dengan analisis mengenai ingatan sosial sebagai unsur pembentuk identitas, akan membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang manusia dan masyarakat di dalam wacana multikulturalisme.³⁶

Teori politik pengakuan dan multikulturalisme yang dirumuskan Taylor memang bisa memberikan sumbangan besar bagi tata ekonomi, politik, maupun kultural di Indonesia. Namun situasi Indonesia juga bisa memperkaya analisis teori politik pengakuan dan multikulturalisme yang dirumuskan Taylor tersebut. Indonesia adalah bangsa yang hidup dengan trauma. Sejak masa kolonialisme, pemerintahan totaliter orde baru, dan krisis ekonomi yang dimulai akhir dekade 1990-an dan belum berakhir secara tuntas sampai sekarang, begitu banyak peristiwa traumatis yang melukai kehidupan bersama, sebut saja kerja paksa, pembodohan melalui penjajahan, perang kemerdekaan yang meregut ratusan ribu jiwa, penculikan dan pembantaian orang-orang yang dituduh PKI sejak 1965, rasisme dan diskriminasi yang dibentuk oleh pemerintahan totaliter orde baru, konflik antar etnis dan agama yang merebak di seluruh penjuru tanah air, dan bencana alam yang seolah membunuh begitu banyak orang tanpa alasan yang masuk akal.

Deretan peristiwa menyedihkan itu membuat identitas sosial bangsa Indonesia menjadi traumatis. Tidak hanya itu begitu banyak peristiwa

36 Bdk. Maurice Halbwachs, *Collective Memory*, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

negatif sepanjang sejarah bangsa Indonesia tidak pernah diungkap dan dipertanggungjawabkan. Keadilan ditutupi oleh kemunafikan. Jutaan korban dan keluarganya merasa terpinggirkan. Identitas diri dan kelompok mereka terbentuk di dalam trauma sosial yang begitu akut. Dendam dan kebencian menjadi bagian dari udara yang dihirup sehari-hari. Trauma itulah yang kiranya menjadi latar belakang dari banyak kebobrokan mental yang menjangkiti bangsa kita sekarang ini. Bagaimana teori politik pengakuan dan multikulturalisme yang dirumuskan Charles Taylor memahami semua gejala ini?

Pada hemat saya pemikiran Taylor, setidaknya yang terkait dengan politik pengakuan dan multikulturalisme, tidak mampu memahami fenomena negativitas sejarah Indonesia tersebut secara memadai. Dibutuhkan kerangka analisis lebih jauh untuk bisa menempatkan trauma sosial sebagai bagian dari identitas sosial yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok identitas partikular. Identitas yang traumatis terbentuk di dalam anomali dan negativitas peradaban. Polanya unik dan membutuhkan pemahaman sendiri. Pengakuan dan pengembangannya pun membutuhkan ruangnya sendiri yang unik. Kiranya Taylor bisa menengok masalah ini untuk mengembangkan pemikirannya.³⁷

Pada tataran filsafat politik, Taylor rupanya tidak menjawab pertanyaan ini secara lugas, yakni bagaimana menjamin tata politik sosial ekonomi tidak kembali menjadi diskriminatif, akibat adanya satu kelompok dominan yang mendapatkan prioritas kultural dibanding kelompok-kelompok lainnya? Argumen dasar Taylor adalah, bahwa setiap kelompok berhak mendapatkan pengakuan dan pengembangan dalam relasi dengan kelompok-kelompok lainnya. Bukankah yang sering terjadi adalah adanya satu kelompok yang memperoleh keistimewaan lebih dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini berpijak pada fakta, bahwa realitas itu kehidupan manusia tidak pernah bisa mencapai titik keseimbangan. Perlakuan pemerintah dan proses interaksi antara kelompok identitas pada akhirnya akan bermuara pada asimetri. Kemungkinan ini terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diharapkan Taylor.

Di dalam filsafat politik kontemporer, terutama yang dirumuskan Habermas, seorang filsuf kontemporer asal Jerman, hukum adalah penjaga integrasi di dalam masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok identitas. Hukum adalah penjamin bahwa setiap kelompok akan diperlakukan dalam kedudukan yang setara, lepas dari apapun identitas

37 Bdk. F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas*, Jakarta: Gramedia, 2005; Reza, A.A. Wattimena, "Ingatan Sosial, Trauma, dan Maaf," *Jurnal Respons*, Vol 13, Desember, Jakarta: Atma Jaya, 2008.

partikularnya. Hukum tersebut merupakan hasil diskursus yang bebas dominasi, egaliter, dan tanpa paksaan dari pihak-pihak yang nantinya akan terkena dampak dari hukum tersebut.³⁸ Titik pijak Habermas adalah politik kesetaraan yang sebenarnya justru ditentang Taylor. Bagi Taylor kesetaraan itu hanya mitos. Pemerintah tidak boleh bersikap netral di hadapan beragam kelompok partikular, karena netralitas semacam itu hanyalah konsep yang menutupi diskriminasi dibaliknya. Walaupun menolak rumusan Habermas, Taylor, sejauh saya memahaminya, tidak memberikan solusi tegas atas kemungkinan kembalinya masyarakat multikultur ke masyarakat feodal yang justru ingin ditentangnya.³⁹

Lalu bagaimana dengan Sandra, seorang gadis cerdas yang mengalami dilema tentang salah satu hal yang paling menentukan di dalam kehidupannya, yakni pernikahan?⁴⁰ Sandra dan orang tuanya kiranya bisa mulai duduk berdialog dengan memperhatikan dua prinsip. *Prinsip pertama* adalah prinsip otentisitas. Artinya setiap pribadi berhak untuk hidup seturut dengan keyakinan identitas partikularnya secara jujur. Selain itu setiap pribadi berhak untuk mengembangkan identitas partikularnya untuk mencapai hidup yang bermutu.

Prinsip kedua adalah prinsip nilai kultural. Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa setiap bentuk pandangan hidup memiliki nilai pada dirinya sendiri, lepas dari segala irasionalitas yang mungkin ada di dalamnya. Kedua tradisi yang menjadi latar belakang diskusi Sandra dan orang tuanya memiliki nilai pada dirinya sendiri. Keduanya bernilai luhur maka perlu untuk mendapatkan tempat yang tepat di dalam dialog. Kedua prinsip ini memang tidak bisa memberikan jawaban pasti atas permasalahan konkret yang dihadapi Sandra dan kedua orang tuanya. Namun kedua prinsip ini bisa menjadi titik pijak untuk mulai membangun dialog yang mengarah pada kesepakatan yang bebas dominasi dan masuk akal. Mungkin saja Sandra meninggalkan kekasihnya untuk menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Mungkin juga ia memilih untuk menikah dengan kekasih hatinya yang berasal dari Prancis, dan mengabaikan saran kedua orang tuanya. Keduanya bisa dilakukan selama itu diputuskan atas dasar yang tepat dengan mengacu pada kesepakatan yang bebas dan masuk akal antara Sandra dengan orang tuanya. Masuk akal disini berarti kesepakatan itu didasarkan pada alasan-alasan yang siap dikomunikasikan secara dua arah, maka sifatnya terbuka.

38 Lihat, Juergen Habermas, *Between Facts and Norms*, New Bakersville: MIT Press, 2001.

39 Saya membahas bagaimana Habermas mengajukan solusi untuk menata masyarakat yang beragama secara sosial di dalam Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

40 Lihat bagian pendahuluan untuk menyegarkan ingatan.

Cerita tentang Indonesia adalah cerita tentang keberagaman. Cerita tentang Indonesia dapat ditemukan pada cerita kecil seorang Sandra yang harus membuat keputusan penting dalam hidupnya. Semua keberagaman itu baru bermakna, jika ditanggapi dengan tepat. Indonesia yang bermakna adalah Indonesia yang otentik, yakni yang setia pada dirinya sendiri. Indonesia yang bermakna adalah Indonesia yang setia pada identitas keberagaman kulturalnya yang sudah berusia puluhan abad. Indonesia yang berani berkata, “kami berbeda!” dan siap untuk mempertanggungjawabkannya di depan pengadilan akal budi serta peradaban manusia universal!

- *) **Reza A.A. Wattimena**
Pengajar dan peneliti di Pusat Kajian Multikulturalisme (PUSKAM) di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Email: reza.antonius@gmail.com

BIBLIOGRAFI

- Abbey, Ruth. “Timely Meditations in an Untimely Mode.” Dalam Ruth Abbey, ed. *Charles Taylor*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Memahami Negativitas*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Habermas, Juergen. *Between Facts and Norms*. New Bakersville: MIT Press, 2001.
- Halbwachs, Maurice. *Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Hefner, Robert W., ed. *The Politics of Multiculturalism*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism*. London: MacMillan Press, 2000.
- Taylor, Charles. “The Politics of Recognition.” Dalam Any Gutmann, ed. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Wattimena, Reza, A.A. “Ingatan Sosial, Trauma, dan Maaf.” *Jurnal Respons*. Vol. 13. Desember, Jakarta: Atma Jaya, 2008.
- — — —. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Internet:

- [http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_\(philosopher\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(philosopher)) diakses pada 12 Oktober 2009.
- http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722